



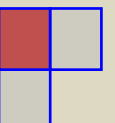
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
KABUPATEN KULON PROGO**

Alamat : Jalan Sugiman No. 03 Wates Kulon Progo Telp./Fax.
(0274)773026

Email : dinsos@kulonprogokab.go.id

Website : dinsos.kulonprogokab.go.id





BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 317/C/2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2022 telah ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. Penutup.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 September 2022

Pj. BUPATI KULON PROGO,

TRI SAKTIYANA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
 2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kulon Progo.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-ags-

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI		
		

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 dapat kami susun. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini disusun guna memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan sekaligus sebagai dokumen program kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 serta dengan memperhatikan isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah, tema dan prioritas pembangunan tahun 2022.

Kami menyadari dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mohon masukan guna penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diharapkan dengan adanya Rencana Perubahan ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi seluruh personil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka melaksanakan tugas di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Wates, 2 September 2022


Kepala Dinas

Drs. YOHANES IRIANTA, M.Si
19630527 198903 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KEPUTUSAN KEPALA DINAS	
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL.....	3
BAB. I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB. II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022.....	9
2.2. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022.....	18
2.3. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022	21
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	24
3.1. Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	24
3.2. Perubahan Indikator Kinerja Program	25
3.3. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah	30
	26
BAB. IV PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo s/d triwulan II Tahun 2021 (Tahun Berjalan)	13
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo	19
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022	24
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022.....	25
Tabel 3.3	Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Prioritas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022	27
Tabel 3.4	Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022.....	39

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka diharuskan agar didalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2020 memperhatikan RPJP Tahun 2005-2025, RPJPD Propinsi DIY Tahun 2005-2025, dan dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025, serta berpedoman pada RPJMD 2017 – 2022 Kabupaten Kulon Progo dan Perubahan RKPD Tahun 2022.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Mengingat pentingnya dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi, perlu menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2022. Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak disusun dengan proses sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah

3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
5. Telaah terhadap rancangan awal
6. Perumusan tujuan dan sasaran
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
8. Perumusan kegiatan prioritas
9. Penyajian awal dokumen Renja Perangkat Daerah
10. Penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah
11. Pembahasan forum Perangkat Daerah
12. Penyesuaian dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Tahun 2012-2032;
 15. Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Fungsi, dan tugas serta tata kerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019.
 17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pememerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon progo Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud : Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar

sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta untuk mengintegrasikan program-program pembangunan dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022.

2. Tujuan : a) Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan program dan kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah;
- b) Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2022 dan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran 2022
- c) Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi urusan melalui capaian target kinerja program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

2.3. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

2.4. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

2.4. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

3.2. Perubahan Indikator Kinerja Program

3.3. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas social Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan ketugasan bidang Sosial dan pemberdayaan perempuan dan anak. Dalam rangka ketugasan tersebut, pada tahun 2022 melaksanakan 10 program, 18 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
	1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
	b.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	a.	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
	b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran
	3)	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	a.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	4)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	a.	Penyelenggaraan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5)	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	a.	Pengelolaan sarana dan Prasarana {endukung Gedung Kantor atau Bangunan

		Lainnya
	6)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	a	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
	7)	Pengumpulan sumbangan Dalam Daerah Kab/Kota
	a	Koordinasi dan sinkronisasi pemberian zin Undian gratis Berhadiah dan Pengumpulan uang atau barang
	8)	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
	a	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kelembagaan Kab/Kota
	B	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kerja Kesejahteraan social Kecamatan Kewenangan kab/Kot
	C	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan social Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	9)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, Serta Gelandangan –engemis di luar Panti Sosial
	A	Penyediaan Permakanan
	B	Penyediaan alat bantu
	C	Pemberian bimbingan fisik, mental , spiritual dan sosial;
	D	Pemberian Bimbingan, Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis dan Masyarakat
	E	Pemberian layanan akses pendidikan dan Kesehatan Dasar
	F	Pemberian layanan kedaruratan
	G	Pemberian layanan Rujukan
	10)	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial
	A	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	

	11)	Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/kota
	A	Pendataan fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota
	B	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
	12)	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/kota
	A	Penyediaan Makanan
	13)	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsoagaan bencana Kab/Kota
	A	Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan Kampung siaga bencana
	B	Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan Taruna siaga bencana
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
	14)	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota
	A	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota
6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
	15)	Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	A	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	b	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota
7	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
	16	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	A	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup daerah Kabupaten/Kota
8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
	17	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	a	Penyediaan Data Gender dan anak di Kewenangan kab/Kota
	b	Penyajian dan Pemanfaatan data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di tingkat Kewenangan Kabupaten/Kota
9	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK(PHA)	

	18	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah kabupaten/Kota

Evaluasi kinerja dan keuangan Renja Dinsos PPPA Tahun 2022 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dalam dokumen Renja Tahun 2022 yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun 2022. Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Tahun 2022, sedangkan jumlah Anggaran (Rupiah) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022.

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian Renja untuk Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Triwulan II Tahun 2022 tercantum dalam tabel 2.1 sebagai berikut : (Sebagaimana terlampir)

2.2 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial PPPA berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinsos PPPA dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinsos PPPA sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinsos PPPA digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra OPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Hasil analisis kinerja pelayanan Dinsos PPPA sebagaimana Tabel 2.2 berikut:

2.3 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Berdasarkan hasil dan capaian program kegiatan tahun 2022 sampai dengan triwulan (dua) 2 Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak tidak tercapai sesuai target, adapun faktor - faktor ketidaktercapaian disebabkan karena adanya kendala teknis terhadap pelaksanaan kegiatan.

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 sebesar 18.28, hal ini membuktikan bahwa upaya pelaksanaan program penurunan angka kemiskinan terbukti menjadi daya ungkit terhadap penurunan kemiskinan. Dampak pandemi Covid 19 yang melanda hampir seluruh pelosok juga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kulon Progo.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Isu-isu strategis yang menjadi **tantangan** Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

- 1) jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya fakir miskin, penyandang disabilitas dan Orang Tua terlantar masih cukup tinggi ;
- 2) keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, termasuk Panti Pelayanan Sosial yang memadai ;
- 3) Minimnya kapasitas kesiapsiagaan terhadap bencana alam/sosial sementara frekuensi/variasi bencana sangat kompleks;
- 4) Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, termasuk pekerja sosial masyarakat dan potensi kesejahteraan masyarakat lainnya;
- 5) masih rendahnya Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 6) dampak kecanggihan teknologi dan informasi juga mempengaruhi jumlah kekerasan terhadap anak serta kekerasan dalam rumah tangga

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial PPPA

Kemiskinan merupakan permasalahan utama dan merupakan prioritas dalam penentuan kebijakan pemerintah daerah. Masalah kemiskinan di wilayah Kabupaten Kulon

Progo lebih banyak dijumpai di Bagian Utara yang merupakan daerah Perbukitan Menoreh. Gejala kemiskinan tersebut disebabkan antara lain oleh daya dukung alam yang relatif kurang, prasarana sosial ekonomi yang belum merata dan kelembagaan yang belum menjangkau masyarakat setempat serta mutu sumberdaya manusia yang relatif masih rendah. **Kebijakan** penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini ditujukan untuk :

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan

Penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah dalam bentuk :

- e. penyuluhan, bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial bagi PMKS dan PSKS;
- f. pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
- g. penyediaan akses pelayanan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bagi PMKS;
- h. pemberdayaan masyarakat melalui program BPNT dengan melibatkan E Warung;
- i. pengembangan KUBE;
- j. Pembinaan desa Prima
- k. Penilaian P2WKSS

Permasalahan kemiskinan tersebut sangat berkaitan dengan permasalahan dalam Urusan sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

Tantangan yang sekaligus menjadi peluang untuk dapat dikembangkan dalam bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah :

Permasalahan lain yang menjadi **tantangan** dalam urusan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

Urusan Sosial :

Berbagai tantangan yang mampu dioptimalkan sebagai upaya mengatasi berbagai masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Kulon Progo, seperti :

- a. Jejaring kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial, seperti dengan LSM/NGO, CSR Perusahaan, serta perorangan atau lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap penanganan PMKS;

- b. Adanya kader penanggulangan kemiskinan yang salah satu tugasnya sebagai pendamping sosial bagi PMKS dalam mengakses berbagai informasi dan sumber pelayanan yang ada.
- c. Semangat kesetiakawanan sosial yang tinggi walaupun tetap harus terus dikembangkan kepada seluruh elemen, sehingga nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong-royong mampu menjadi modal sosial yang kuat dalam upaya penanganan berbagai masalah sosial.
- d. Sarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, seperti Panti Sosial. Secara kelembagaan sudah ada , walaupun sarana prasarana pendukung masih harus ditingkatkan.
- e. Kebijakan yang mengarah pada pola jaminan sosial bukan bantuan sosial bagi PMKS yang tidak potensial, seperti Lanjut usia miskin, dan penderita cacat berat. Selain itu program-program penguatan kapasitas PMKS juga perlu terus dilakukan untuk mendorong kemandirian.
- f. Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terus dilakukan sebagai upaya memperkuat fungsi kelembagaan tersebut dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial.

Urusan pemberdayaan Perempuan :

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan daerah seperti :

- a) Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender disemua bidang dalam tahap pembangunan masih kurang
- b) Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c) Hambatan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender karena masih cukup tingginya angka kemiskinan perempuan.
- d) Pengungkapan kasus - kasus KDRT terhambat disebabkan karena faktor psikologi keluarga.
- e) Peningkatan penggunaan media sosial on line oleh anak sehingga memudahkan akses dan menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f) Kendala Regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g) Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah.
- h) Meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak serta kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Perubahan pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA MURNI TAHUN 2022	TARGET KINERJAPERUBAHAN TAHUN 2022
		Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	100%	100%
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Menurunnya Kemiskinan dan Mengurangi Pengangguran	Meningkatnya penanganan permasalahan social	Indeks penanganan permasalahan sosial	72,32%	72.32%
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	73.72%	73.72%

Tahun 2022

3.2. Perubahan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Program Perubahan pada Renja OPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan PERLINDUNGAN ANAK
Tahun 2022

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA MURNI TAHUN 2022	TARGET KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
1	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100%	100%
			Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100%	100%
			Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100%	100%
2	Meningkatnya penanganan permasalahan sosial	Rehabilitasi Sosial	Indeks Rehabilitasi social	42,78 nilai	42,78 nilai
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	Indeks Perlindungan dan Jaminan Sosial	94,41 nilai	94,41 nilai
		Penanganan Bencana	Indeks Penanganan Bencana	1,00 nilai	1,00 nilai
3	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan	68,81 %	68,81 %

	Perempuan	Perempuan		
	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	91,60 %	91,60 %
	Perlindungan Perempuan	Cakupan Perlindungan Perempuan	99,99 %	99,99 %
	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	55,00 %	55,00 %

3.3. Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah

Tema pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2022 adalah **”Mempercepat Pembangunan Insfrastruktur , Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas SDM Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah ”**

Berdasarkan Tema pembangunan daerah tersebut di atas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo menjabarkan dalam program dan kegiatan Perubahan Tahun 2022.

Secara rinci Program dan kegiatan Perubahan 2022 sebagaimana Tabel 3.3, dan table 3.4 Bantuan Sosial 2022 sebagai berikut :

Sebagaimana terlampir.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tahun 2022 disusun berdasarkan RKPDP Perubahan Tahun 2022, RPJMD Kabupaten Kulon Progo dan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mencapai program dan sasaran pembangunan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, kecamatan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya yang telah menghasilkan prioritas kegiatan dan sasaran merupakan acuan/pedoman dalam pelaksanaan Forum OPD yang selanjutnya akan dilanjutkan dalam Forum Musrenbang untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2022.

Agar realisasi Program dan Kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku kepentingan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Wates, 2 September 2022


 Kepala Dinas

Drs. YOHANES IRIANTA, M.Si
19630527 198903 1 005

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KULON PROGO
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN RPJMD & RENSTRA	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 DAN PEMUTAKHIRAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN 2021 (N-1)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2022		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D TRIWULAN II TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D TRIWULAN II TAHUN 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		Sosial	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Kendaraan ambulance 1 unit			1		-								1		1						
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Pelayanannya Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	6,800,902,607.83	100.00	6,166,128,574.42	100	3,160,264,677	50.79	519,133,563	67.2	835,681,839			67.20	1,354,815,402.00	67.20	7,520,943,976.42					
			Program Pelayanannya Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100.00	2,158,568,736.00	100.00	3,858,444,449.00	100.00	2,965,569,355	25.00	496,052,026	50.00	770,371,490			50.00	1,266,423,516.00	50.00	5,124,867,965.00	50.00	237.42	DinsosPPPA		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan jasa surat menyurat, jasa pegawai tidak tetap serta peralatan perkantoran berupa alat tulis kantor barang cetakan/pengandaian dan bahan pustaka	72	1,350,441,422.77	60	1,058,160,949.00	12	322,164,484	3	50,241,213.00	3	112,436,515.00			6	162,677,728.00	66	1,220,838,677.00			DinsosPPPA		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengolah data 1 orang, pengelola pengadministrasi keuangan 1 orang, pelaksana pengolah data 1 orang, sopir 1 orang, pramu kantor 1 orang, penjaga malam 1 orang, penjaga malam 1 orang, dan petugas kebersihan 1 orang	-		12										-		12						
			Penyediaan Jasa keuangan	Gaji dan tunjangan ASN	-	0.00	12	2,277,051,394.00	12	2,519,233,671.00	3	443,657,813.00	3	646,331,438.00			6	1,089,989,251.00	18	3,367,040,645.00			DinsosPPPA		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Honor penatahusahaan keuangan dan barang	72	212,012,684.36	60	167,500,950.00	12	48,225,000	3	278,000.00	3	612,000.00			6	890,000.00	66	168,390,950.00			DinsosPPPA		
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Rapat koordinasi dan konsultasi	72	596,114,628.86	60	355,731,156.00	12	74,946,200	3	1,875,000.00	3	10,991,537.00			6	12,866,537.00	66	368,597,693.00			DinsosPPPA		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja (%)	100.00	322,569,585.00	100.00	213,057,850.00	100.00	25,610,200	27.38	6,517,250	51.59	9,127,650			51.59	15,644,900.00	51.59	228,702,750.00	51.59	70.90	DinsosPPPA		
			Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinsos PPPA Tahun n+1 dan Perubahan Rencana Perangkat tahun n dan Renstra Dinsos PPPA 2023-2026	13	159,586,802.24	7	95,262,900.00	3	8,824,900	-	2,854,500.00	1	3,045,000.00			1	5,899,500.00	8	101,162,400.00			DinsosPPPA		
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, Laporan SPIP	111	121,873,050.06	58	85,789,450.00	21	10,876,000	7	1,660,750.00	5	4,624,750.00			12	6,285,500.00	70	92,074,950.00			DinsosPPPA		
			Penyusunan laporan keuangan	Dokumen laporan keuangan	66	41,109,732.69	42	32,005,500.00	14	5,909,300	4	2,002,000.00	3	1,457,900.00			7	3,459,900.00	49	35,465,400.00			DinsosPPPA		
			Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD	Cakupan peningkatan sarana/prasarana Kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD (%)	100.00	4,319,764,286.83	100.00	2,094,626,275.42	100.00	169,085,122	87.63	16,564,287	87.63	56,182,699			88	72,746,986.00	88	2,167,373,261.42	87.63	50.17	DinsosPPPA		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		3,081,210,147.43	24	1,558,406,168.42	12	169,085,122	3	16,564,287.00	3	56,182,699.00			6	72,746,986.00	30	1,631,153,154.42			DinsosPPPA		
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana perkantoran	Pembayaran listrik, telepon, air dan komponen listrik dan kebersihan			24									-		24							
			Pengadaan Barang Milik Daerah	Meubelair meja front office (1 unit), kursi tunggu (2 unit), almari arsip (3 unit) komputer PC (4 unit), laptop (2 unit), printer (7 unit), scanner (1 unit), AC (2 unit), pengeras suara wireless (4 unit), LCD proyektor (1 unit)	135	1,238,554,139.40	-	557,907,270.00	-	0	-	0.00	-	0.00			-	0.00	-	557,907,270.00			DinsosPPPA		
			Program Pemberdayaan Sosial	Indeks Pemberdayaan Sosial	42.78	4,123,870,000	43.39	4,761,206,276	42.78	1,812,035,900	43.39	25,361,300	43.39	142,252,900			43.39	167,614,200.00	43.39	4,928,820,476.00	101.43	119.52	DinsosPPPA		
			Rehabilitasi Sosial Dasar	Indeks Rehabilitasi Sosial	42.78	1,799,490,323.80	43.39	2,116,083,826.00	42.78	532,387,900.00	0.00	16,237,300.00	43.39	89,027,000.00			43.39	105,264,300.00	43.39	2,221,348,126.00					
			Rehabilitasi Sosial Dasar	Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial																					
			Peningkatan pelayanan distribusi Rastra	Telaksananya koordinasi dan Money bantuan Pangan	48	778,967,670.00	34	685,232,100.00	12	74,830,300	3	3,682,300.00	3	27,887,000.00			6	31,569,300.00	40	716,801,400.00			DinsosPPPA		
				Laporan distribusi bantuan pangan	48		24		12		3		3			6		30							
				Sosialisasi bantuan pangan	225		212		235		-		235			235		447							

			Bimtek penyaluran bantuan pangan	210		-	-														
	Peningkatan jejaring kerjasama pelayanan sosial bagi PMKS	Perbaikan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarlar, Anak Terlarlar, Lanjut Usia Terlarlar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kerjasama pelayanan PMKS	124	280,511,430.00	50	378,780,000.00	12	158,761,100	3	7,155,000.00	3	29,250,000.00		6	36,405,000.00	56	415,185,000.00	DinsosPPPA		
			Sarasehan Komda Lansia	165	-	-	-														
			Pelayanan Jamkesmas terpadu	600		1		1									1				
			Sosialisasi Jamkesmas terpadu					1													
			Facilitasi rujukan PMKS	24		24												24			
			Sosialisasi Jamkesmas terpadu 2 kali (jamkesmas terpadu APBD KP93 orang, Jamkesmas terpadu non APBD KP 66 orang)	477		70												70			
			Facilitasi pengiriman peserta Hari Lanjut Usia Nasional (Halun) DIY	3		1		1							1			2			
			Facilitasi pengiriman peserta Hari Disabilitas Internasional (HDI)	3		1		1										1			
			Facilitasi adopsi anak	36		24		12		3					6			30			
			Bantuan Sosial Perawatan Jenazah			12		12		3					6			18			
			Hibah PMI			1		1							1			2			
			Respon kasus penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)			12		12		3					6			18			
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial																		
	Pemberdayaan Ekonomi Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Kube dan UEP	152	311,311,553.80	26	672,065,928.00	-	249,628,800		1,100,000.00		2,640,000.00			3,740,000.00	26	675,805,928.00	DinsosPPPA		
			Data base Kube	6		2		1										2			
			Bantuan Modal Usaha untuk KUBE Pengembangan (BKU)			20												20			
			Sosialisasi Bansos KUBE			50												50			
	Peningkatan kapasitas PSKS	Perbaikan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya lomba kreativitas bagi PSKS	6	419,699,670.00	3	380,005,800.00	1	51,167,700	-	4,300,000.00	1	29,250,000.00		1	33,550,000.00	4	413,555,800.00	DinsosPPPA		
			Terbinanya LKS, WKSBM, Orsos, TKSK, PSM, KUBE, dan Karang Taruna	17		28		7	7						7			35			
			Terfasilitasinya koordinasi PSKS	176		34		3	2						2			36			
			Terfasilitasinya peserta HKSN	400		100												100			
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	94.41	2,324,379,676.00	75.32	2,645,122,450.00	94.41	1,539,900,400	49.89	9,124,000	49.87	53,225,900		49.87	62,349,900.00	49.87	2,707,472,350.00			
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
	Peningkatan pelayanan PKH	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Upaya pemberdayaan keluarga FDS (Family Development Session) bagi KPM PKH	12	557,377,730.00	5	1,099,522,200.00	1	1,061,087,700	-	3,325,000.00	-	19,130,900.00			22,455,900.00	5	1,121,978,100.00	DinsosPPPA		
			Terlaksananya sosialisasi PKH	19		122		110					110					232			
			Bimtek gradiasi PKH	609																	
			Sosialisasi Assessment PKH gradiasi	609		203												203			
			Bantuan modal usaha untuk penguatan UEP PKH tahun 2018 (BKU)			24												24			
			Bantuan modal usaha untuk penguatan UEP PKH tahun 2021 (BKU)			178												178			
			Buku Data Penerima PKH			1		1							1			2			
			Facilitasi kegiatan FDS (Family Development Session)	12		4												4			
			Koordinasi PKH	74		7		9		2		3			5			12			
	Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen data kemiskinan	2	1,767,001,946.00	3	1,545,600,250.00	-	218,560,300		5,799,000.00		34,095,000.00			39,894,000.00	3	1,585,494,250.00	DinsosPPPA		
			Verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu	41,000		26,500		#####										26,500			
			Bimtek petugas verifikasi dan validasi data	204		12												12			
			Dokumen data terpadu kesejahteraan sosial 1 dokumen					1													
			Koordinasi petugas verifikasi dan validasi data 10 kali					10		2		3			5			5			
			Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					102.00	260,252,400	0.00	0.00		0.00			0.00		0.00			
			Program Perlindungan Sosial	94.41	17,833,144,050.00	81.54	15,723,079,634.00	94.41	13,292,100,300.00	60.28	3,137,844,000.00	60.27	#####		60.27	6,591,603,500.00	60.27	22,314,683,134.00	63.84	125.13	DinsosPPPA
			Program Rehabilitasi Sosial	42.78	17,363,013,493.00	43.39	15,287,842,834.00	42.78	13,159,195,600	-	3,122,608,500	43.39	3,406,525,500		43.39	6,529,134,000.00	43.39	21,816,976,834.00			
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial																		
	Peningkatan kualitas pelayanan PMKS	Pembinaan Layanan Data dan Pengaduan	Pelayanan Sosial kepada PMKS	#####	3,633,817,115.50	4,024	15,170,412,784.00	12	13,140,621,500	3	3,122,608,500	3	3,398,108,500		6	6,520,717,000.00	4,030	21,691,129,784.00	DinsosPPPA		
			Facilitasi penyaluran bantuan sosial bantuan non tunai	30,000		18,087												18,087			
			Bansos Bagi Anak Balita Terlarlar			74		100				100			100			174			
			Bansos Bagi Pantli Asuhan dan Pantli Jompo			16		23										16			
			Bansos Bagi Psakitik					20		3		17						20			

Tabel 3.4 :
Belanja Bantuan Hibah Bansos
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022

No	Uraian	OPD	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp 000)	Keterangan
1	Bantuan kecelakaan kerja bagi penderes kelapa	Dinas Sosial PPPA	325,000,000	
	- Korban meninggal sejumlah 10 orang @Rp.5.000.000,-			
	- Korban cacat berat sejumlah 14 orang @Rp.15.000.000,-			
	- Korban cacat ringan sejumlah 13 orang @Rp.5.000.000,-			
2	Bantuan Pangan Non Tunai	Dinas Sosial PPPA	10,560,000,000	
3	Pemberian bantuan sosial anak balita terlantar sejumlah 100 anak @ Rp.1.000.000	Dinas Sosial PPPA	100,000,000	
4	Pemberian bantuan sosial bagi panti asuhan dan panti jompo sejumlah 23 panti	Dinas Sosial PPPA	360,000,000	
5	Pemberian bantuan sosial pelayanan psikotik sejumlah 20 orang @ Rp. 250.000,-	Dinas Sosial PPPA	5,000,000	
6	Hibah PMI	Dinas Sosial PPPA	75,000,000	
	Jumlah		11,425,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022										Catatan Pent 9	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja							Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											18,264,400,877	18,618,211,513			18,922,716,545			
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											3,160,264,677	3,236,775,013			3,204,282,745		
1	6	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											19,700,900	19,700,900			20,005,000		
1	6	1.2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Renja dan Renja Perubahan OPD	Dukungan 50% terhadap cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	8,824,900	8,824,900		Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	9,005,000
1	6	1.2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan triwulanan, lap tahunan, monitoring evaluasi kinerja dinas ,LKPI,LPPD LKJlp	Dukungan 50% terhadap cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	21 dokumen	21 dokumen	100 %	100 %	10,876,000	10,876,000		Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	11,000,000
1	6	1.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,574,367,971	2,574,367,971				2,586,450,157	
1	6	1.2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan sebesar 33.33% terhadap capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	2,519,233,671	2,519,233,671	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2,519,904,757
1	6	1.2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 33.33% terhadap capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	49,225,000	49,225,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	60,325,000
1	6	1.2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan bulanan,semesteran, dan akhir tahun	Dukungan sebesar 33.33% terhadap capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	14 dokumen	14 dokumen	100 %	100 %	5,909,300	5,909,300	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	6,220,400
1	6	1.2.06		Administrasi Umum										74,946,200	74,946,200				79,958,000	
1	6	1.2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dana untuk perjalanan dinas,makanan dan minuman koordinasi dan konsultasi	Dukungan sebesar 100% terhadap capaian administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	74,946,200	74,946,200		Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	79,958,000

1	6	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	62,638,000				5,000,000	
1	6	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	Dukungan sebesar 100% terhadap Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 unit	0 unit	100 %	100 %		0	62,638,000		Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,000,000
1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											322,164,484	326,368,420				326,928,632	
1	6	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat, jasa pegawai tidak tetap serta peralatan perkantoran berupa alat tulis kantor barang cetakan/penggandaan dan bahan pustaka	Dukungan sebesar 100% terhadap capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	322,164,484	326,368,420			Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	326,928,632
1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											169,085,122	178,753,522				185,940,956	
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pembayaran listrik, telepon, air dan komponen listrik dan kebersihan, Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan perkantoran berupa kendaraan dinas roda empat 5 unit, roda 6 satu unit, roda dua 8 unit, AC 2 unit, komputer/laptop 5 unit, printer 6 unit	Dukungan sebesar 100% terhadap Peningkatan sarana dan Prasarana kerja dan Kualitas SDM OPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	169,085,122	178,753,522			Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	185,940,956
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											13,691,583,500	13,691,583,500				14,965,442,500	

2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								421,348,900	1,034,954,900					304,171,700		
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								39,259,600	39,259,600					41,950,100		
2	8	2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								39,259,600	39,259,600					41,950,100		
2	8	2.03	2		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Ekspos hasil karya kaum perempuan	Dukungan 33.305% terhadap Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68.81 %	68.81 %	1 kali	1 kali	100 %	100 %	15,570,900	15,570,900	Dana Insentif Daerah	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	68.81 %	16,915,900
2	8	2.03	3		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Kewirausahaan P2WKSS, Desa Prima dan Perempuan Pelaku Industri Rumahan	Dukungan 33.305% terhadap Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68.81 %	68.81 %	30 orang	30 orang	100 %	100 %	23,688,700	23,688,700	Dana Insentif Daerah	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	68.81 %	25,034,200
							Penilaian Kalurahan Pelaksana Program Terpadu Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)					1 Kali	1 Kali								
							Terbinanya Kelompok P2WKSS					8 Kelompok	8 Kelompok								
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								129,355,900	259,366,400						0	

2	8	3	2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										129,355,900	174,606,400						0	
2	8	3	2.01	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perlindungan perempuan	Operasional P2TP2A	Dukungan 88.86% terhadap Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.99 %	99.99 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	129,355,900	174,606,400	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Cakupan perlindungan perempuan	99.99 %		0	
						Tersosialisasikannya kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan					70 orang	70 orang										
						Tersosialisasikannya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak					36 sekolah	36 sekolah										
2	8	3	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota											0 84,760,000						0	
2	8	3	2.02	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	null						0 null				0 84,760,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0	
2	8	5		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK										58,024,500	58,024,500						60,441,500	

2	8	5	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										58,024,500	58,024,500					60,441,500		
2	8	5	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Seminar Peringatan Hari Kartini	Dukungan 249.32 nilai terhadap Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.60 nilai	91.60 nilai	1 kali	1 kali	100 %	100 %	58,024,500	58,024,500	Dana Insentif Daerah	Cakupan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	91.60 nilai	60,441,500	
							Terfasilitasinya koordinasi GOW					12 kali	12 kali									
							Terlaksananya Inisiasi Kalurahan Sadar Gender					7 desa	7 desa									
							Terlaksananya pelatihan PPRG dan ARG					26 orang	26 orang									
							Terlaksananya sosialisasi/pelatihan Pendidikan Politik bagi perempuan					50 orang	50 orang									
							Tersedianya data pilah gender dan anak dalam pembangunan					1 dokumen	1 dokumen									
							Tersusunnya laporan evaluasi PUG					1 dokumen	1 dokumen									
							Tersusunnya laporan lembaga berbasis gender					1 dokumen	1 dokumen									
							Tersusunnya profil pengarusutamaan gender					1 dokumen	1 dokumen									
2	8	6		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)											194,708,900	194,708,900					201,780,100	
2	8	6	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota											194,708,900	194,708,900					201,780,100	

2	8	6	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	Pembinaan desa layak anak	Dukungan 53.90% terhadap Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 %	55 %	12 kalurahan	12 kalurahan	100 %	100 %	194,708,900	194,708,900	Dana Insentif Daerah	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	55 %	201,780,100
							Pembinaan kecamatan layak anak					12 kapanewon	12 kapanewon								
							Penyediaan makanan tambahan bagi anak sekolah di keluarga miskin					370 anak	370 anak								
							Terevaluasinya kabupaten layak anak					1 dokumen	1 dokumen								
							Terfasilitasinya forum anak kabupaten					3 kali	3 kali								
							Terfasilitasinya forum anak kecamatan					12 kali	12 kali								
							Terfasilitasinya Peringatan Hari Anak					1 kali	1 kali								
							Terlaksananya pembinaan kabupaten layak anak					4 kali	4 kali								
							Terlaksananya pelatihan konvensi hak anak					100 orang	100 orang								
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK											0 483,595,500					0
2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											0 109,086,500					0
2	8	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota											0 109,086,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0

